

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan formal saat ini dituntut tidak hanya mampu menghasilkan lulusan semata, namun pendidikan juga harus memiliki orientasi yang jelas kearah mana lulusan akan berkontribusi dimasyarakat. “Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk bekerja dalam bidang tertentu” (Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003).

Pemerintah Indonesia sudah berusaha untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan berbagai kebijakan yang dibuat, tetapi hal tersebut belum juga mampu meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Meskipun belum mampu meningkat dengan baik, tetapi sedikit demi sedikit mutu pendidikan di Indonesia akan meningkat jika pemerintah menjalankan kebijakan dengan sebenar-benar nya dan seserius mungkin tanpa ada penyimpangan. Pemerintah dan anak bangsa harus bekerja sama mencari solusi dan menyelesaikan masalah pada pendidikan saat ini. Anak bangsa juga harus membantu pemerintah untuk menjalankan berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Jika kita lihat saat ini, kondisi pendidikan Indonesia masih saja memprihatinkan, terutama mengenai fasilitas pendidikan di daerah-daerah, baik sarana maupun prasarana pendidikan. Masih saja terdengar kabar ada bangunan sekolah yang tidak layak untuk digunakan.

Untuk mengatasi berbagai kekurangan ini, pemerintah pun mengupayakan berbagai hal agar kualitas pendidikan di Indonesia bisa berkembang dan maju. Misalnya, dengan memberikan bantuan-bantuan dalam pos pendidikan untuk meringankan biaya sekolah. Dalam hal ini, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar 20 persen untuk bidang pendidikan. Tak hanya itu saja, kualitas guru pun ditingkatkan dengan berbagai pelatihan untuk menambah kemampuan guru dalam menyampaikan mata pelajaran ke siswa-siswanya. Selain itu, pemerintah juga melakukan pemetaan kondisi pendidikan di setiap provinsi di Indonesia. Hal ini diperlukan untuk mengetahui kondisi

pendidikan di setiap wilayah agar standar pelayanan dan standar nasional pendidikan tercapai. Dengan tercapainya kedua hal ini, tentunya mutu pendidikan secara nasional pun dapat dicapai.

Pendidikan di Indonesia meskipun belum bisa di sejajarkan dengan negara di Asia lainnya, tapi pendidikan yang ada di Indonesia sudah mengalami perubahan yang lebih baik dari sebelumnya. Namun demikian, jika kita lihat dari Kondisi Pendidikan Tenaga Kerja Indonesia menurut data Februari tahun 2016 yang dirilis Harian Kompas 4 Oktober lalu sangat memprihatinkan. Bagaimana tidak, dari 120,647,697 tenaga kerja 73,913,490 hanya sampai SLTP, atau 61,26% belum lulus SLTA, dan disamping itu yang terjadi pada anak usia sekolah tingkat putus sekolah di SD masih tergolong sangat tinggi.

Menurut data Kemedikbud tahun 2015, angka melanjutkan dari SD ke SLTP hanya 77,27 %. Artinya, ada 22,73% atau 1,014,079 anak tidak lulus atau lulus SD yang tidak melanjutkan. Kondisi ini terakumulasi dari tahun 2012 – 2015 ada 5,034,072 anak usia sekolah yang tidak melanjutkan ke SLTP, kondisi ini jika dibiarkan akan menjadi beban bangsa ini di masa yang akan datang, saat ini, saya yang ada di Komisi X DPR RI mendorong untuk segera dilakukan revolusi di bidang pendidikan dengan melaksanakan program wajib belajar 12 tahun kepada seluruh warga bangsa . Hal ini tentu menunjukkan Komisi X DPR RI sangatlah peduli terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia, tetapi dalam prakteknya masih banyak warga Indonesia yang masih pendidikannya rendah dan kualitas SDM apa adanya.

Untuk menopang semua itu, Komisi X DPR RI memberikan beasiswa bagi yang tidak mampu dan juga bagi yang berprestasi, Beasiswa ini berupa PIP (Program Indonesia Pintar) setiap tahunnya mulai tingkat SD, SMP, SMA dan SMK termasuk juga pembenahan sarana infrastruktur sekolah sehingga dengan demikian pendidikan yang ada di Indonesia menjadi merata dan menyentuh ke semua lapisan masyarakat terutama juga yang terkategori daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar). Saat ini, kita harus sudah mulai sadar dan membuka jendela lebih lebar lagi tentang bahaya keterbelakangan atau ketinggalan dalam kualitas pendidikan. Salah satunya, adalah lahirnya

gelombang globalisasi yang di rasa semakin kuat dan sangat terbuka serta kemajuan teknologi yang semakin pesat perkembangannya.

Semua itu, ternyata mampu memberikan kesadaran baru bagi bangsa Indonesia bahwa saat ini, Kita berada di tengah – tengah dunia yang baru, yaitu dunia yang semakin terbuka lebar. Kita di tuntut mampu menguasai kecepatan dan ke canggihan teknologi dan kualitas pendidikan Indonesia dengan negara lain yang di rasakan adanya keterlambatan dan keterbelakangan serta ketertinggalan di dalam mutu pendidikan bangsa ini. Kita harus mampu memanfaatkan kemajuan teknologi ini untuk memudahkan kita dalam menjangkau yang tidak terjangkau. Melalui teknologi informasi dan komunikasi, maka program peningkatan kualitas pendidikan seperti peningkatan kualitas guru, dan kualitas pembelajaran yang merupakan faktor utama dalam menentukan kualitas lulusan SDM dapat kita raih dengan cepat.

Untuk melakukan pemerataan dan perluasan akses, Komisi X DPR RI mendorong dilaksanakannya proses pembelajaran dalam berbagai cara seperti pemanfaatan media internet, Media Televisi dan Radio agar fleksibilitas masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan akan semakin mudah, luas dan murah. disamping itu, tentu pembenahan dalam berbagai hal juga perlu dilakukan, seperti memperbaiki kesejahteraan guru selain dari insentif finansial juga dengan memberikan penghormatan kepada guru sebagai warga bangsa kelas satu yang ditunjukan dalam memberikan layanan khusus kesehatan, transportasi, tempat tinggal dan berbagai kemudahan lainnya.

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia pada setiap unit kerja juga akan berhubungan dengan hakikat pendidikan dan pelatihan.

Menurut Sumarsono (2009, hlm. 11) pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu faktor yang penting dalam pengembangan SDM. Pendidikan dan pelatihan tidak hanya menambah pengetahuan, akan tetapi

juga meningkatkan ketrampilan bekerja, dengan demikian dapat meningkatkan produktivitas kerja.

Pendidikan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.

Pendidikan menurut Ahmad D. Marimba (2008, hlm. 34): Mengemukakan bahwa pendidikan ialah suatu proses bimbingan yang dilaksanakan secara sadar oleh pendidik terhadap suatu proses perkembangan jasmani dan rohani peserta didik, yang tujuannya agar kepribadian peserta didik terbentuk dengan sangat unggul. Kepribadian yang dimaksud ini bermakna cukup dalam yaitu pribadi yang tidak hanya pintar, pandai secara akademis saja, akan tetapi baik juga secara karakter.

Pelatihan menurut Dessler (2009, hlm. 121) adalah proses mengajarkan karyawan baru atau yang ada sekarang, ketrampilan dasar yang mereka butuhkan untuk menjalankan pekerjaan mereka. Pelatihan merupakan salah satu usaha dalam dunia kerja. Pegawai, baik yang baru ataupun yang sudah bekerja perlu mengikuti pelatihan. Karena adanya tuntutan pekerjaan yang dapat berubah akibat perubahan lingkungan kerja, strategi, dan lain sebagainya.

Menurut Rivai (2009, hlm. 67) pelatihan merupakan bagian yang menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan ketrampilan diluar sistem pendidikan yang berlaku dalam waktu relatif singkat dengan metode yang lebih mengutamakan pada praktek daripada teori. Pendidikan dan pelatihan merupakan penciptaan suatu lingkungan dimana para pegawai dapat memperoleh atau mempelajari sikap, kemampuan, keahlian, pengetahuan dan perilaku yang spesifik yang berkaitan dengan pekerjaan (Yuniarsih dan Suwatno, 2011)

Menurut Mar’at (1981, hlm. 12) “Sikap adalah kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek di lingkungan tertentu sebagai suatu penghayatan

terhadap objek tertentu”. Sementara itu menurut Notoadmojo (2003, hlm. 126) “Sikap merupakan reaksi atau respon seseorang yang masih tertutup terhadap suatu stimulasi atau objek”.

Selanjutnya beberapa definisi sikap menurut Djaali (2009, hlm. 114) diantaranya :

1. Harlen menunjukkan bahwa sikap merupakan kesiapan atau kecenderungan seseorang untuk bertindak dalam menghadapi suatu objek atau situasi tertentu.
2. Trow mendefinisikan sikap sebagai suatu kesiapan mental atau emosional dalam beberapa jenis tindakan pada situasi yang tepat. Disini *Trow* lebih menekankan pada kesiapan mental atau emosional seseorang terhadap suatu objek.

Pendidikan yang menjadi salah satu solusi dalam mengatasi masalah perekonomian ternyata masih belum terealisasi. Seharusnya dengan kualitas pendidikan yang baik akan menghasilkan sumber daya manusia yang baik pula. Namun pada kenyataannya jumlah pengangguran terdidik di Indonesia masih banyak. Hal tersebut dapat dilihat pada table 1.1 mengenai tingkat pengangguran berdasarkan pendidikannya.

Tabel 1.1

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas

Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Diselesaikan Pada Tahun Ajaran 2013-2015

Pendidikan tertinggi		2013		2014		2015	
		Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus
1		2	3	4	5	6	7
SD Ke bawah		3,55	3,44	3,69	3,04	3,61	2,74
Sekolah		8,21	7,59	7,44	7,15	7,14	6,22

Menengah Pertama							
Sekolah Menengah Atas		9,45	9,72	9,10	9,55	8,17	10,32
Sekolah Menengah Kejuruan		7,72	11,21	7,21	11,24	9,05	12,65
Diploma I/II/III		5,72	5,95	5,87	6,14	7,49	7,54
Universitas		5,02	5,39	4,31	5,65	5,34	6,40

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa lulusan SMA dan SMK yang menjadi pengangguran menempati posisi teratas. Hal ini bertentangan dengan posisi SMK menurut UU Sistem Pendidikan nasional No.20 tahun 2003 pasal 18 dan 15 yang menyebutkan bahwa : “satuan pendidikan menengah kejuruan sebagai lanjutan dari pendidikan dasar yang bertujuan mempersiapkan peserta didik terutama dalam bidang pekerjaan tertentu”. Dengan kata lain SMK dirancang untuk menyiapkan peserta didik atau lulusan siap pakai di lapangan pekerjaan dan mudah terserap ke dunia kerja. Pendidikan menengah kejuruan merupakan jalur pendidikan formal yang mempersiapkan lulusannya untuk menjadi tenaga kerja yang terampil, kreatif, produktif, dan berkompetisi untuk memasuki dunia usaha dan industri. Selain itu lulusan SMK juga dipersiapkan untuk mampu membuka usaha atau berwirausaha.

Pada kenyataannya yang terjadi sekarang menunjukkan bahwa lulusan SMK menjadi salah satu penyumbang pengangguran terbanyak setelah SMA. Selain itu jumlah wirausaha di Indonesia pun masih sedikit . Begitu pula yang terjadi pada SMA Negeri 15 Bandung . Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelusuran dokumentasi bimbingan dan konseling SMAN 15 Bandung, menunjukkan bahwa persentase lulusan yang bekerja menurun dan masih

sedikit. Hal ini dapat dilihat pada table 1.2 mengenai rekapitulasi penelusuran tamatan siswa SMAN 15 Bandung.

Tabel 1.2
Penelusuran Tamatan Siswa SMAN 15 Bandung
2014/2015

(Persen) Tahun Lulus	Program Keahlian	Bekerja	Wirausaha	Melanjutkan		Jumlah
Jurusan	Jumlah	%	%	%		
2014/2015		125	32,8	1,6	29,6	64
IPA	168	44,64	2,38	20,24		67,26
	143	48,25	4,2	20,98		73,43
Jumlah	436	42,43	2,75	23,2		68,38
2014/2015		125	33,60	1,60	29,60	48,80
IPS	169	44,97	2,37	20,12		29,59
	144	50,00	4,17	20,83		46,53
Jumlah	438	25,57	0,91	14,16		40,64
2014/2015		130	23,85	0,77	16,15	40,77
BB	166	24,70	0,00	19,88		44,58
	143	27,27	0,70	8,39		36,36
Jumlah	439	21,64	0,46	14,35		36,45

Sumber : Bimbingan dan konseling SMAN 15 Bandung

Berdasarkan pada table 1.2 dapat dilihat bahwa lulusan SMAN 15 Bandung yang bekerja persentasenya menurun yaitu pada tahun 2014/2015 sebesar 42,43%, 2014/2015 sebesar 25,57%, dan 2014/2015 sebesar 21,64%. Diikuti pula oleh persentase lulusan yang berwirausaha pun cenderung masih sedikit yaitu pada tahun 2014/2015 sebesar 2,75%, 2014/2015 sebesar 0,91%, dan 2014/2015 sebesar 0,46%. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa data di SMAN 15 Bandung tersebut menunjukkan lulusan yang bekerja dan

berwirausaha menurun, padahal jika dilihat sekolah SMAN 15 Bandung merupakan sekolah negeri unggulan di Kota Bandung.

Pemerintah memiliki harapan besar terhadap SMA agar dapat menaggulangi pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun di sisi lain kinerja SMA yang telah ada ternyata belum optimal. Menurut Suryanto (2007) dalam Nur Aryani Fathonah (2013, hlm. 6) mengatakan belum optimalnya kinerja SMA ini ditandai oleh pencapaian indikator keberhasilan yang belum optimal.

Indikator-indikator yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Terserapnya tamatan di dunia kerja sesuai dengan kompetensi pada program keahliannya.
2. Mampu mengembangkan diri dalam berwirausaha sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru.
3. Mampu bersaing dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Dapat disimpulkan bahwa kesenjangan yang terjadi antara data yang telah disajikan dengan haapan pemerintah. Hal yang terungkap dalam table 1.2 bertentangan dengan harapan pemerintah pada poin satu dan dua. Poin pertama dikatakan bahwa lulusan terserap ke dunia kerja sesuai dengan kompetensi keahliannya, namun yang terjadi bahwa lulusan yang bekerja ternyata persentasenya mengalami penurunan. Poin kedua lulusan mampu mengembangkan diri dalam berwirausaha sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru, namun yang terjadi lulusan yang berwirausaha masih sedikit.

Oleh karena itu diperlukan sebuah solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satu caranya dengan menyelenggarakan pendidikan kewirausahaan di sekolah khususnya SMK. Dalam pendidikan saat ini yang diterapkan di Indonesia adalah kurikulum 2013, oleh karenanya pendidikan kewirausahaan disebut dengan mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan. Pada prinsipnya, konten Prakarya dan Kewirausahaan sama dengan mata pelajaran Kewirausahaan yang terdapat pada kurikulum sebelumnya. Hanya disini ada penambahan Prakarya dengan memanfaatkan teknologi, kearifan

lokal yang dapat mengangkat budaya bangsa. Tujuan dari penambahan prakarya adalah untuk memberi sumbangan pengembangan kreativitas sebagai sumber dari “industri kreatif” yang sedang diangkat dalam wacana pendidikan, karakter bangsa. Pembelajaran Prakarya khas daerah akan memberi apresiasi tentang multikultural yaitu mengenal budaya suku bangsa Indonesia. Pembelajaran prakarya khas daerah setempat disertai pemahaman terhadap latar belakang penciptaan (budaya dan teknologi tepat guna) akan memberi makna pengembangan pendidikan multikultural. Oleh karenanya, mata pelajaran Prakarya digabungkan dengan kewirausahaan masuk dalam konstelasi „kurikulum pendidikan Indonesia“ yang secara umum diharapkan memberi sumbangan kepada pembentukan karakter yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Guru dan pengelola sekolah sebagai fasilitator dalam dunia pendidikan, berperan untuk membentuk karakter bangsa sekaligus berperan sebagai *the agent change*. Dalam konteks ini, guru harus segera melakukan transformasi yang cepat dalam budaya mengajar (*teaching*) kepada pembelajaran (*learning*) yang diperkuat dengan latihan (*training*) tentang konsep dan prinsip pendidikan keterampilan sebagai *life skill*.

Pendidikan kewirausahaan tersebut hendaknya dikemas sebaik mungkin dalam pembelajaran di kelas karena diharapkan diadakannya mata pelajaran tersebut mampu menumbuhkan perilaku berwirausaha siswa SMA khususnya pada SMAN 15 Bandung.

Sehubungan dengan adanya latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mengamati dan mencermati pembelajaran sikap wirausaha yang dituangkan dalam judul penelitian **“Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Sikap Wirausaha Pada Siswa Kelas XI IPS di SMAN 15 Bandung Tahun Ajaran 2016/2017”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini, adalah :

1. Rendahnya sikap berwirausaha siswa kelas XI IPS di SMAN 15 Bandung.
2. Kurangnya pendidikan dan pelatihan yang diterapkan pada pembelajaran kewirausahaan.
3. Adanya kesenjangan antara jumlah siswa yang bekerja, melanjutkan, dan wirausaha setelah lulus pada siswa kelas XI pada jurusan Akuntansi di SMAN 15 Bandung.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis akan merumuskan masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut :

1. Berapa besar pengaruh pendidikan terhadap sikap kewirausahaan ?
2. Berapa besar pengaruh pelatihan terhadap sikap kewirausahaan ?
3. Seberapa besar pengaruh siswa IPS-1 di SMAN 15 Bandung berminat pada pendidikan dan pelatihan sikap kewirausahaan ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis pembelajaran kewirausahaan siswa kelas XI di SMAN 15 Bandung
2. Memperoleh gambaran mengenai sikap berwirausaha siswa kelas XI di SMAN 15 Bandung.
3. Mengetahui adakah pengaruh pendidikan dan pelatihan terhadap sikap berwirausaha siswa kelas XI di SMAN 15 Bandung.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis.
 - a. Hasil penelitian yang dilaksanakan dapat digunakan sebagai bahan kajian dalam menambah khasanah ilmu pengetahuan terutama mengenai pengaruh pendidikan dan pelatihan terhadap sikap wirausaha.

- b. Hasil penelitian yang dilaksanakan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian sejenis dimasa yang akan datang.
- 2. Secara Praktis.
 - a. Memberikan gambaran bagi siswa tentang pengaruh pendidikan dan pelatihan terhadap sikap wirausaha.
 - b. Memberikan masukan dalam upaya memperbaiki proses pembelajaran agar lebih baik dan berkualitas.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu konsep yang didasarkan pada karakteristik yang dapat diobservasi dari apa yang sedang di definisikan atau mengubah konsep-konsep yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati dan diuji dan ditentukan kebenarannya oleh orang lain.

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah :

1. Pendidikan menurut H. Horne (2002, hlm. 173), adalah proses yang terus menerus (abadi) dari penyesuaian yang lebih tinggi bagi makhluk manusia yang telah berkembang secara fisik dan mental, yang bebas dan sadar kepada Tuhan, seperti termanifestasi dalam alam sekitar intelektual, emosional dan kemanusiaan dari manusia.
2. Pelatihan Menurut Gomes (2003, hlm. 197), adalah setiap usaha untuk memperbaiki performansi pekerja pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggung jawabnya, atau satu pekerjaan yang ada kaitannya dengan pekerjaannya.
3. Sikap wirausaha menurut Stephen dan Timothy, (2008, hlm. 92) mendefinisikan Sikap (*attitude*) adalah pernyataan evaluatif, baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan terhadap objek, individu, atau peristiwa.

Berdasarkan pengertian di atas maka yang dimaksud dengan pengaruh pendidikan dan pelatihan terhadap pembentukan sikap wirausaha siswa ialah suatu pendidikan dan pelatihan yang berkembang secara fisik dan mental, atau usaha untuk memperbaiki performansi pekerja pada suatu pekerjaan

tertentu baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan terhadap objek.

G. SISTEMATIKA SKRIPSI

Dalam skripsi ini penulis membagi dalam lima bab. Bab 1 akan memaparkan mengenai permasalahannya. Disini penulis mengangkat mengenai pengaruh pendidikan dan pelatihan terhadap sikap wirausaha.

Bagian awal skripsi terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan, sari, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran.

1. Bagian isi skripsi terdiri dari lima bab yaitu:

- BAB I : Pendahuluan, dalam hal ini penulis menguraikan tentang latar belakang, permasalahan, tujuan, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika skripsi.
- BAB II : Landasan teori, yaitu bab yang menguraikan tentang kajian pustaka baik dari buku-buku ilmiah, maupun sumber-sumber lain yang mendukung penelitian ini.
- BAB III : Metodologi penelitian, yaitu bab yang menguraikan tentang objek penelitian, variabel, metode penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.
- BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan, yaitu bab yang menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan dari data yang telah diperoleh.
- BAB V : Simpulan dan saran, yaitu bab yang berisi simpulan hasil dan saran serta hasil penelitian.

2. Bagian akhir skripsi: terdiri dari daftar pustaka dan lampiran.